



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NELSON HUMIRAS HALOMOAN SIREGAR
2. Jabatan : KEPALA SUBAUDITORAT
3. NHK : 271633

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/51 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m²/60 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m²/54 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m²/70 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 1054 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/100 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m²/60 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 750.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV 1.5 TC CVT CKD/JEEP 4X2 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 182.065.700



D. SURAT BERHARGA	Rp.	29.342.050
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.849.499.320
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	6.360.907.070
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.360.907.070

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.